



RENCANA KERJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**





SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


* AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Rencana Kegiatan (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana kerja tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Dalam peraturan ini mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 mendatang dapat lebih terarah dan lebih akuntabel.

Kebumen, 8 Agustus 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO, S.Sos, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19691224 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	6
PENDAHULUAN.....	6
I. Latar Belakang.....	6
B. Landasan Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022	13
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD	13
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	26
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	63
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	64
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	79
BAB III.....	80
TUJUAN, SASARAN PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	80
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	80
B. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Kebumen	84
C. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	88
BAB IV.....	91
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	91
A. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	91
BAB V.....	107
PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISKOMINFO Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.....	86
Tabel 3. 2.	Aspek dan Indikator Tujuan dan Sasaran DISKOMINFO	87
Tabel 4. 1.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Dan Informatika	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Peta Jaringan Fiber Optik	27
--	----

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selaku penanggung jawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan *review* hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per

keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra PD, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

- Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
 23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
 25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Tahun 2024 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen untuk Tahun Anggaran 2024.
2. Tujuan dari disusunnya Renja Kominfo tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Kominfo tahun 2021-2026;
 - b. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
 - c. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam

- rangka mendukung program pemerintah daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
 - f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang; mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- B. Landasan Hukum; memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- C. Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.
- D. Sistematika Penulisan; menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD; memuat kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2022), perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023); selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan PD; berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Indikator Kinerja Kunci, capaian kinerja urusan yang diampu oleh OPD.
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD; berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/internasional (seperti SPM dan SDGs), tantangan dan peluang, rekomendasi dan catatan

strategis.

- D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD; berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra), penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat; menguraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan (Kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi, kecamatan, kelurahan, desa serta pokir).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; berisikan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tupoksi PD
- B. Tujuan dan Sasaran Renja PD; berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
- C. Program dan Kegiatan; berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Berisikan rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Gambaran kinerja Diskominfo diperoleh dari evaluasi capaian kinerja hingga tahun 2023 triwulan II. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kebumen

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,60	3,05	3,43	3,44	100,30%	3,45	3,45	95,83%
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	60 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	30 dokumen	50%
2	16	01	2.01	01	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	42 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	21 dokumen	50%
2	16	01	2.01	07	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	18 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.02	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.02	03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	2 kegiatan	3 kegiatan	37,5
2	16	01	2.02	10	Sub-Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	0	250 orang	250 orang	100%	250 orang	500 orang	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.02	11	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang didiklat	132 orang	0	0	0	31 orang	31 orang	23,48	
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.06	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.06	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.06	05	Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.06	06	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.06	07	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.06	09	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180 unit	149 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	155 unit	86,11
2	16	01	2.07	05	Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	51 unit	41 unit	0	0	0	0	41	80,39

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.07	06	Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	129 unit	108 unit	0	0	0	2 unit	110 unit	85,27
2	16	01	2.07	10	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	3 unit	3 unit	100%	1 unit	4 unit	0
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.08	01	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.08	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.08	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.09	02	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.09	05	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50
2	16	01	2.09	06	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	01	2.09	09	Sub-Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	15 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	40
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks PPID	43,14	20,98	25,88	100%	100%	30,22%	31,76%	73,63
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	220 OPD dan desa	0	132 OPD dan desa	135 OPD dan desa	102,28%	154 OPD dan desa	162 OPD dan desa	73,63
2	16	02	2.01	05	Sub-Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	67.890 Jam	11.315 Jam	11.315 Jam	11.315 Jam	100%	11.315 Jam	33.945 Jam	50
2	16	02	2.01	06	Sub-Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	220 OPD dan desa	3 kegiatan	132 OPD dan desa	135 OPD dan desa	102,28%	154 OPD dan desa	162 OPD dan desa	73,63

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	02	2.01	12	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	58 Kali	12 Kali	8 Kali	8 Kali	100%	5 Kali	5 Kali	43,10
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,87	3,86	3,86	3,86	100%	3,86	4,39	113,73%
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket layanan infrastruktur	103 paket	17 paket	10 paket	10 paket	100%	6 paket	33 paket	32,04
2	16	03	2.01	03	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah paket layanan infrastruktur	103 paket	17 paket	10 paket	10 paket	100%	6 paket	33 paket	32,04

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	574 aplikasi	94 aplikasi	96 aplikasi	120 aplikasi	125%	120 aplikasi	334 aplikasi	58,18
2	16	03	2.02	07	Sub-Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	574 aplikasi	94 aplikasi	96 aplikasi	120 aplikasi	125%	120 aplikasi	334 aplikasi	58,18
2	16	03	2.02	10	Sub-Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa	400 desa	100 desa	50 desa	50 desa	100%	100 orang	150 orang	37,5
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	20	02	2.10		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50
2	20	02	2.10	01	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	158 OPD	28 OPD	26 OPD	26 OPD	100	26 OPD	80 OPD	50,63
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	100%	35,65%	38,91%	39,56%	101,68	61,30%	60,65%	60,65

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	460 desa/kelurahan	164 desa/kelurahan	179 desa/kelurahan	182 desa/kelurahan	101,68%	282 desa/kelurahan	279 desa/kelurahan	60,65
2	21	02	2.01	03	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	460 desa/kelurahan	164 desa/kelurahan	179 desa/kelurahan	182 desa/kelurahan	101,68%	282 desa/kelurahan	279 desa/kelurahan	60,65

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan renja tahun 2023(tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)				
2	21	02	2.01	04	Sub-Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	460 desa/kelurahan	164 desa/kelurahan	179 desa/kelurahan	182 desa/kelurahan	101,68%	282 desa/kelurahan	279 desa/kelurahan	60,65

Berdasarkan Tabel 2.1., Target Renstra untuk Indikator Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika 3,87 dan sudah terealisasi 4,39 sehingga capaian realisasinya 113,73%. Sedangkan tingkat capaian realisasi target Renstra untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 60,65%, atau sudah 279 desa/kelurahan dari target 460 desa/kelurahan yang menggunakan Tanda tangan Elektronik dalam layanan administrasi.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, DISKOMINFO mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

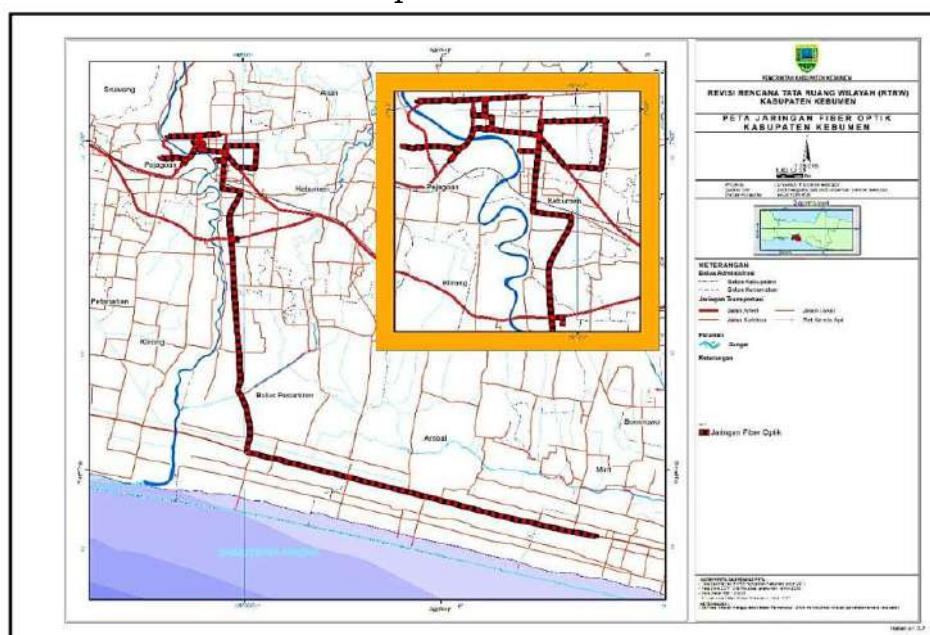
Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan selama 4 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika yang meningkat meliputi jumlah OPD yang memiliki akses internet, sistem informasi yang ada dan titik *hotspot* yang difasilitasi Pemkab. Hanya indikator jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi dan radio komunikasi yang aktif yang stagnan selama kurun waktu 2018-2022. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Kebumen pada tahun 2018-2022 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 4. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah OPD yang memiliki akses internet	113	129	146	146	138
2	Jumlah sistem informasi yang ada	90	101	106	106	177
3	Jumlah titik hotspot yang difasilitasi pemkab	113	129	146	146	138
4	Jumlah media yang digunakan untuk penyebaran informasi	5	5	5	5	5
5	Jumlah radio komunikasi yang aktif	10	10	14	14	13

Sementara itu, Pemkab Kebumen juga menyediakan infrastruktur sistem jaringan online dengan membangun jaringan LAN berbasis *fiber* optik serta membangun data *center* yang aman, cepat dan handal. Peta jaringan *fiber* optik di Kabupaten Kebumen secara lengkap tersaji pada Gambar berikut:

Gambar 2. 1. Peta Jaringan Fiber Optik Kabupaten Kebumen



Sumber: Peta Revisi RTRW, 2018

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk

berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari indikator indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah.

Capaian indeks SPBE Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 5. Nilai Sistem SPBE Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,11	2,64	3,42	3,05	3,44

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

b. Urusan Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik

yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pemerintah telah menginisiasi program Satu Data Indonesia dengan di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata Kelola data administrasi, Lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan upaya mengintegrasikan beragam data yang ada di setiap kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Kinerja urusan statistik pada tahun 2017-2021 meliputi tersusunnya Buku Daerah Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto, Buku Profil Daerah, Buku Studi Ketimpangan Pendapatan, Buku Studi Nilai Tukar Petani dan Statisik Sektoral Kab. Kebumen. Hal lainnya adalah mampu mewujudkan kemudahan mengakses data statistik melalui penyusunan berbagai sistem informasi manajemen (SIM) data pembangunan daerah yang memuat data statistik hasil pembangunan daerah yang terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Tabel 2. 6. Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan	4	4	5	6	6
a	Kebumen Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b	PDRB Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c	Profil Daerah (SIPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
d	Studi Ketimpangan Pendapatan	Ada	-	Ada	Ada	Ada
e	Studi Nilai Tukar Petani	-	Ada	-	Ada	Ada
f	Statisik Sektoral Kab. Kebumen	-	-	Ada	Ada	Ada

Pada Bulan Juni 2021 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kabupaten Kebumen, dalam Perbup tersebut mengatur tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan Satu Data di tingkat Kabupaten Kebumen. Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Kebumen, yaitu Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, semua Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

sebagai produsen data, serta Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator Forum Satu Data Kabupaten Kebumen. Satu Data Kebumen dapat diakses di laman *website* <https://satudata.kebumenkab.go.id/>. Satu data termasuk ke dalam urusan statistik dan BAPPEDA sebagai koordinatornya.

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan statistik yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *up to date*. Koordinasi antarlembaga dan antar OPD terkait data statistik ini juga belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala, misalnya pada implementasi satu data Indonesia, sehingga penyediaan data statistik yang dimutakhirkan belum tersedia secara optimal.

c. Urusan Persandian

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi (dalam hal ini *digital signature*) dalam komunikasi antar perangkat daerah. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sampai dengan tahun 2020, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan digital signature dalam komunikasi antarperangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat memperhatikan keamanan dokumen dari pemalsuan. Akan tetapi, di level pemerintah desa belum ada desa yang menerapkan *digital signature*.

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam komunikasi antar perangkat daerah. Berdasarkan data tahun 2020 seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan digital signature (Tanda Tangan Elektronik) dalam komunikasi antarperangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat memperhatikan keamanan dokumen dari pemalsuan. Berikut merupakan data penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Kabupaten

Kebumen.

Tabel 2. 7. Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
PD	-*	26	26	26	24
Kecamatan	-*	26	26	26	26
Kelurahan	-*	26	11	11	11

Kabupaten Kebumen telah memiliki Tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 488/176 yang diresmikan oleh Bupati Kebumen dan Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara pada 2 Juni 2021. Pada kegiatan peresmian tersebut juga telah dilakukan penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Kepala Desa (Kades) yang nantinya dapat digunakan oleh untuk melakukan TTE pada layanan administrasi yang ada di desa. Adapun layanan administrasi desa tersebut disediakan melalui aplikasi desa *online* kebumen. Saat ini telah diterbitkan TTE bagi 279 Kades di Kabupaten Kebumen. Monitoring penggunaan TTE di Kabupaten Kebumen dapat diakses melalui laman <https://sitektonik.kebumenkab.go.id/>.

Permasalahan terkait penyelenggaraan urusan persandian yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah kurangnya kesadaran Perangkat Dinas (PD) terhadap keamanan informasi.

Tabel 2. 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks SPBE (Urusan Komunikasi dan Informatika)	-	-	3,45	3,43	3,45	3,50	3,05	3,44	3,45	3,50	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30,77%	38,63%	38,64%	38,65%	30,77%	38,63%	38,64%	38,65%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	78,06%	78,07%	78,08%	78,09%	100%	78,07%	78,08%	78,09%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
2.	Persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP (Urusan Statistik)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
		-	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
			Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
3.	Persentase Urusan Persandian	-	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	16,74%	38,91%	61,30%	83,48%	35,65%	39,56%	61,30%	83,48%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	78%	78,01%	78,02%	-	78%	78,01%	78,02%	Realisasi capaian 2023 merupakan proyeksi

Pada tahun 2022-2025 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM. Berdasarkan Tabel 2.2. tidak terdapat target untuk IKK di Renstra 2021-2026, sedangkan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 Urusan Komunikasi dan Informatika 100%, Urusan Statistik 100%, dan Urusan Persandian 78%.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika untuk urusan Komunikasi dan Informatika ada tiga yakni :

- Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sudah tercapai 100% atau seluruh Perangkat Daerah (50 PD) di Kabupaten Kebumen sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Dihitung dari jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi dengan jumlah PD Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
- Persentase Layanan Publik Diselenggarakan Secara *Online* dan Terintegrasi baru mencapai 38,63% atau baru 14 aplikasi layanan publik yang terintegrasi dari jumlah total yakni 44 aplikasi layanan publik yang tersedia. Dihitung dari jumlah aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi dibagi dengan jumlah aplikasi layanan publik.
- Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sudah tercapai 78,07%. Dihitung dari jumlah masyarakat sasaran penyebaran informasi publik dibagi dengan jumlah penduduk.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika untuk urusan Statistik ada dua yakni :

- Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sudah tercapai 100%. Dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (50 PD) dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah (50 PD).
- Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sudah tercapai 100%. Dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah (50 PD) dibagi dengan jumlah PD (50 PD).

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika untuk urusan Persandian yaitu : Tingkat keamanan informasi pemerintah yang dihitung menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan

penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu :

- a. Tata Kelola Keamanan Informasi;
- b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi;
- c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
- d. Pengelolaan Aset informasi;
- e. Teknologi dan Keamanan Informasi;
- f. Peran TIK.

Pengisian Aplikasi Indeks KAMI dilakukan pada kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Informasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Aplikasi Informatika di berbagai kota di Indonesia.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, perlu mengetahui permasalahan yang ada guna mempertajam kebijakan pelayanan DISKOMINFO untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD antara lain :

- Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Belum semua aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah belum terintegrasi. Sampai tahun 2022 telah banyak aplikasi *e-government* yang telah diterapkan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Namun hampir sebagian besar aplikasi tersebut belum terintegrasi sehingga perangkat daerah masih harus menginput data di masing-masing aplikasi.

- Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kebumen.
- Jaringan TIK belum optimal. Berdasarkan data kondisi infrastruktur digital Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2022 terlihat baru terdapat 11,96% persen desa/kelurahan yang terkoneksi jaringan *fiber optic* dan *wireless*. Kondisi ini tentu saja akan menghambat penerapan *e-government* di Kabupaten Kebumen meskipun sebagian besar desa telah mengupayakan koneksi internet secara mandiri.
- Urusan Statistik
 - Belum optimalnya penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan *update* (Penyediaan data statistik valid dan dimutakhirkan masih belum optimal).
 - Koordinasi antarlembaga dan antar-OPD terkait data statistik ini juga belum berjalan secara optimal. Meskipun kewenangan terkait pengelolaan data statistik ini sudah dibagi dan diatur melalui peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja serta peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala.
- Urusan Persandian
 - Belum optimalnya pemanfaatan digital *signature* oleh perangkat daerah dan desa.

Berdasarkan permasalahan yang akan dihadapi, isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- Urusan Komunikasi dan Informatika : keterbatasan akses internet masyarakat. Keterbatasan akses disebabkan oleh jaringan TIK belum optimal, masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kebumen dan aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah belum terintegrasi
- Urusan Statistik : Kebutuhan data yang *realibel* dan akuntabel. Kebutuhan data disebabkan karena masyarakat belum memperoleh data statistik sektoral yang valid, *update*, dan *reliable*.
- Urusan Persandian : tuntutan keamanan data disebabkan karena masih banyaknya celah keamanan sistem informasi pemerintah.

D. *Review* Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat penambahan subkegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD yakni Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang bersumber dari dana kebijakan cukai tembakau.

Perbandingan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan Renstra 2024 (Renstra 2021-2026)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu (Rp)	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.343.379.371	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.963.071.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Indeks SPBE	3,50	11.064.879.371	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Indeks SPBE	3,50	12.438.273.000	efisiensi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.808.904.371	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.243.591.000	efisiensi
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	32.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen	65.000.000	efisiensi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7 dokumen	19.200.000	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7 dokumen	40.000.000	efisiensi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen 3 Laporan	12.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen 3 Laporan	25.000.000	efisiensi
Administrasi Keuangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	3.373.464.861	Administrasi Keuangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	3.890.246.000	efisiensi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 31 Orang/bulan	3.208.824.861	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 31 Orang/bulan	3.740.246.000	sesuai
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	164.640.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Bulan	150.000.000	sesuai

			SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen				SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	80.670.000	Adanya dana kebijakan dana bea cukai tembakau	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	250 Orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	-	-	Adanya dana kebijakan dana bea cukai tembakau	
Kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah orang yang didiklat	-	-	Kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah orang yang didiklat	33 orang	80.670.000	efisiensi	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	104.000.000	Administrasi Umum	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang Terbayar	12 Bulan	204.000.000	efisiensi	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	6.000.000	efisiensi	
		Jumlah Paket	4 Paket				Jumlah Paket	4 Paket			

			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 4 Paket	28.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan 4 Paket	45.000.000	efisiensi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 4 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 4 Paket	25.000.000	efisiensi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	12 Bulan	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	12 Bulan	18.000.000	efisiensi

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen		
Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	16.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	40.000.000	efisiensi	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	70.000.000	efisiensi	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 unit	160.565.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 unit	10.300.000	sesuai	
Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo Kab.Keb	Jumlah unit Pengadaan Mebel	-	-	Pengadaan Mebel	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah unit Pengadaan Mebel	2 Unit	10.300.000	efisiensi	

		umen									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	160.565.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	sesuai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	559.874.510	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	723.162.000	sesuai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 Laporan	2.122.000	efisiensi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	459.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	621.040.000	sesuai

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	98.274.510	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan 12 Laporan	100.000.000	efisiensi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	379.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	270.213.000	sesuai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	12 Bulan 33 Unit	105.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	12 Bulan 33 Unit	140.000.000	efisiensi

			Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Bulan 34 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Bulan 34 Unit	3.713.000	sesuai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 107 Unit	51.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 108 Unit	75.000.000	sesuai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	51.500.000	Sesuai
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Indeks PPID	34,51 %	2.847.331.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Indeks PPID	34,51 %	2.359.560.000	Sesuai
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	154 OPD,Desa	2.847.331.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	154 OPD,Desa	2.359.560.000	Sesuai
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	8 Dokumen	2.029.569.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media	8 Dokumen	1.340.841.000	Sesuai

			Komunikasi Publik					Komunikasi Publik			
			Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	11315 Jam				Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	11315 Jam		
Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen	295.558.000	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	806.539.000	Sesuai	
		jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	154 OPD,Desa				jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	154 OPD,Desa			
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	8 Dokumen	522.204.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	212.180.000	Adanya dana tambahan untuk publikasi KIE (Kebumen International Expo) Tahun 2023	
		jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	8 Kali				jumlah pertemuan LKM dan FK Metra	8 Kali			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,86 nilai	3.408.644.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,85 nilai	4.835.122.000	Sesuai	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh	Dinas Kominfo Kab.Keb	Jumlah paket layanan infrastruktur	11 Paket	2.570.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah paket layanan infrastruktur	11 Paket	3.900.000.000	Sesuai	

	Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	umen				Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah paket layanan infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	11 Paket 2 Unit	2.570.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah paket layanan infrastruktur Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	11 Paket 2 Unit	3.900.000.000	Sesuai
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	96 Aplikasi	838.644.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	96 Aplikasi	935.122.000	Sesuai
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah aplikasi pendukung SPBE	96 Unit 96 Aplikasi	798.644.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah aplikasi pendukung SPBE	96 Unit 96 Aplikasi	768.070.000	Sesuai
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	40.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	167.052.000	Sesuai

			Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP	100%	73.500.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP	100%	167.052.000	Sesuai
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	73.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	167.052.000	Sesuai
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 Dokumen	73.500.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 Dokumen	167.052.000	Sesuai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	1 Dokumen 26 OPD	73.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	1 Dokumen 26 OPD	167.052.000	Sesuai
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan	83,48 %	205.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan	83,48 %	357.746.000	Sesuai

			Kelurahan					Kelurahan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	83,48 %	205.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	83,48 %	357.746.000	Sesuai
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	384 Desa/Kelurahan	205.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	384 Desa/Kelurahan	357.746.000	Sesuai
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	384 Desa/Kelurahan 1 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	384 Desa/Kelurahan 1 Laporan	53.045.000	Sesuai

			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	384 Desa/Kelurahan	180.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo Kab.Kebumen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	282 Desa/Kelurahan	304.701.000	Sesuai
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50 Perangkat Daerah				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50 Perangkat Daerah		

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, merupakan kesesuaian antara Renstra 2024 dengan RKPD 2024 dapat disimpulkan bahwa Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp500.000.000,- bersumber dari dana DBH CHT masuk dalam Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan. Sub kegiatan ini tidak masuk dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen 2021-2026 karena merupakan dana kebijakan dari Dirjen Bea Cukai.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pokok-pokok pikiran anggota DPRD (politis). Untuk Tahun Anggaran 2024 tidak ada usulan atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kebumen.

Tabel 2.4. Tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III.

TUJUAN, SASARAN PROGRAM, DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik, dan urusan persandian akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adalah melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong,” ketujuh agenda pembangunan beserta target-targetnya menjadi acuan penting terkait arah kebijakan dan strategi nasional. Berikut adalah penjelasan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yang terdapat pada RPJMN 2020-2024:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan RPJMN 2020—2024, Kemenkominfo mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan (7)

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan

3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah
6. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis.

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau,
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital,
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos,
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional,
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika,
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis,
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital,
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah,
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selaras dengan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Kebijakan Provinsi

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah:

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera
“Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2018-2023 yaitu Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral.
3. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebagai *leading* sektor di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Kebumen

Visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*”. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kebumen mempunyai tugas untuk ikut menyukseskan misi yang kesatu yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana diamanatkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Komunikasi memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel.
3. Terwujudnya birokrasi yang kapabel.

Dalam mencapai tujuan maka beberapa sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Meningkatnya pengelolaan web site satu data
2. Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi
3. Meningkatnya Tata Kelola SPBE

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISKOMINFO Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,97	82,50	83,00	84,00	85,00	85,00	86,00	86,00
		Meningkatnya pengelolaan web site satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	Nilai	63,65	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
		Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	%	10,00	16,74	38,91	61,30	83,48	100,00	100,00	100,00
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel		Indeks SPBE	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60
		Meningkatnya Tata Kelola SPBE	Indeks SPBE	Indeks	3,42	3,42	3,43	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60

Tabel 3. 2. Aspek dan Indikator Tujuan dan Sasaran DISKOMINFO Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
			Tahun 2024
A.	Indikator Tujuan 1.		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Statistik)		
	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	%	100,00
B.	Indikator Tujuan 2.		
	Nilai SAKIP	Nilai	71,00
B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Persandian)		
	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa)	%	83,48
C.	Indikator Tujuan 3.		
	Indeks SPBE	Indeks	3,50
C.1	Indikator Sasaran (IKU Urusan Kominfo)		
	Indeks SPBE	Indeks	3,50

C. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan PD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2024, DISKOMINFO mempunyai 5 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- I. NON URUSAN
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.1.2. Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2.2. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.3.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- 1.3.3. Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 1.3.4. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 1.3.5. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
 - 1.3.6. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.6.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.6.3. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.7.2. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
 - 1.7.3. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.4. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- 1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Sub-Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - 1.1.2. Sub-Kegiatan Pelayanan Informasi

- Publik.
 - 1.1.3. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
- 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - 2.2. Kegiatan Pengelolaan *e-government* Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Sub-Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 2.2.2. Sub-Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- III. URUSAN STATISTIK
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
- IV. URUSAN PERSANDIAN
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - 4.1.2. Sub-Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp11.343.379.371,-.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. 1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											11.068.190.000	13.141.359.000		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					4.936.449.000	5.946.677.000	DAU	P1
2.16.01.2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 dokumen			24.000.000	65.000.000	DAU	P1
2.16.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	7 dokumen			14.400.000	40.000.000	DAU	P1
2.16.01.2.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Dinas Komunikasi			Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	3 Dokumen			9.600.000	25.000.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					dan Informatika					Perangkat Daerah yang tersusun					
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan			3.613.847.000	3.890.246.000	DAU	P1
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.464.089.000	3.740.246.000	DAU	P1
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan				
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	149.758.000	150.000.000	DAU	P1
										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen				

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										SKPD					
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan			150.000.000	580.670.000	DAU	P1
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	250 Orang	150.000.000	500.000.000	DAU	P1
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan			80.000.000	204.000.000	DAU	P1
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4.000.000	6.000.000	DAU	P1
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket				
2.16.01.	Penyediaan Bahan				Dinas					Jumlah bulan	12 Bulan	21.000.000	45.000.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.06.04	Logistik Kantor				Komunikasi dan Informatika					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket				
2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	9.000.000	25.000.000	DAU	P1
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket				
2.16.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12 Bulan	4.000.000	18.000.000	DAU	P1
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen				
2.16.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				Dinas Komunikasi dan					Jumlah bulan Penyediaan Bahan/Material	12 Bulan	12.000.000	40.000.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Informatika					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket				
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	30.000.000	70.000.000	DAU	P1
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit			142.777.000	199.386.000	DAU	P1
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	142.777.000	158.786.000	DAU	P1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan					556.953.000	723.162.000	DAU	P1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Dinas Komunikasi					Jumlah bulan Penyediaan Jasa	12 Bulan	1.625.000	2.122.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					dan Informatika					Surat Menyurat					
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	459.600.000	621.040.000	DAU	P1
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	95.728.000	100.000.000	DAU	P1
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	12 Bulan			368.872.000	284.213.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Daerah							Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	94.872.000	154.000.000	DAU	P1
										Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit				
	Pemeliharaan Mebel				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	3.000.000	3.713.000	DAU	P1
										Jumlah Mebel yang Dipelihara	34 Unit				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	51.000.000	75.000.000	DAU	P1
										Jumlah Peralatan dan Mesin	108 Unit				

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Lainnya yang Dipelihara					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	220.000.000	51.500.000	DAU	P1
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks PPID	30,20 %					2.800.963.000	2.359.560.000		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Komunikasi dan Informatika			jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	154 OPD, Desa			2.800.963.000	2.359.560.000	DAU	P1
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	2.072.563.000	1.340.841.000	DAU	P1
										Jumlah Jam siar Ratih Tv dan Radio In Fm	11315 Jam				
	Pelayanan Informasi Publik				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen	225.820.000	806.539.000	DAU	P1
										jumlah PPID OPD dan desa dalam kondisi baik	154 OPD,Desa				

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen	502.580.000	212.180.000	DAU	P1
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	3,85 nilai					3.112.004.000	4.835.122.000		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah paket layanan infrastruktur	11 Paket			2.310.798.000	3.900.000.000		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah									Jumlah paket layanan infrastruktur	11 Paket	2.310.798.000	3.900.000.000		
								Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			2 Unit				
	Pengelolaan e-government di							Jumlah aplikasi pendukung	96 Aplikasi			801.206.000	935.122.000		

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							SPBE							
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik									Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	96 Unit	766.956.000	768.070.000		
										Jumlah aplikasi pendukung SPBE	96 Aplikasi				
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									Jumlah Desa yang Dilatih Sistem Informasi Desa	50 Desa	34.250.000	167.052.000		
										Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											55.680.000	167.052.000	DAU	P1
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%					55.680.000	167.052.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	1 Dokumen			55.680.000	167.052.000	DAU	P1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	55.680.000	167.052.000	DAU	P1
										jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP	26 OPD				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											163.094.000	357.746.000	DAU	P1
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	61,30 %					163.094.000	357.746.000	DAU	P1
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				Dinas Komunikasi dan Informatika			Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan	282 Desa/Kelurahan			17.980.000	357.746.000	DAU	P1

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan							
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	282 Desa/Kelurahan	145.114.000	53.045.000	DAU	P1
										Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan				
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	1	5	Dinas Komunikasi dan Informatika					Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	282 Desa/Kelurahan	163.094.000	304.701.000	DAU	P1
										Jumlah Perangkat Daerah yang	50 Perangkat Daerah				

Nomor	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Kabupaten	Prioritas Propinsi	Prioritas Nasional	Lokasi	Indikator						Keterangan Sub Kegiatan			
						Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Maju (Rp)	Sumber Dana	Prioritas
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi					
TOTAL												11.068.190.000	13.427.726.000		

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, adalah :

No	Urusan /Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
A.	Urusan Komunikasi dan Informatika	11.068.190.000,-
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	4.936.449.000,-
	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000,-
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.847.000,-
	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000,-
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000,-
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142.777.000,-
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.953.000,-
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.872.000,-
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.800.963.000,-
	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.800.963.000,-
3	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	3.112.004.000,-
	- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.310.798.000,-
	- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	801.206.000,-
B.	Urusan Statistik	
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	55.680.000,-
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.680.000,-

C.	Urusan Persandian	163.094.000,-
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	163.094.000,-
	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	163.094.000,-

BAB V. PENUTUP

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap PD berkewajiban menyiapkan Renja PD. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 memiliki kedudukan strategis yang menghubungkan antara perencanaan di Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, serta keterkaitan dengan Raperda RPJMD atau Rankhir Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp11.343.379.371,-.

Langkah yang dilakukan DISKOMINFO Kabupaten Kebumen dalam menghadapi isu strategis adalah:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Menyediakan jasa koneksi internet dan suku cadang pemeliharaan infrastruktur teknologi dan informasi bagi semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - Melakukan pengembangan dan pemeliharaan terhadap aplikasi pemerintah daerah, mengintegrasikan aplikasi dan menyusun Arsitektur SPBE dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *Smart City* Kabupaten Kebumen;
 - Melakukan pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pelatihan-pelatihan terhadap pegawai internal Dinas Kominfo, OPD dan perangkat desa;
 - Memanfaatkan teknologi digital dalam rangka peningkatan

- kualitas dan mempermudah akses jangkauan wilayah layanan;
- Meningkatkan koordinasi dengan PPID Pembantu agar informasi dan dokumentasi yang disediakan lebih banyak;
 - Meningkatkan diseminasi informasi melalui penguatan KIM/LKM dan FK Metra
2. Urusan Statistik
- Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari OPD selaku produsen data. Kemudian dilakukan pemeriksaan data dan mendesiminasikan data melalui media buku dan media elektronik (*website* Satu Data dan aplikasi baik berbasis web maupun android);
 - Selain itu juga melakukan pengembangan sumber daya manusia bidang statistik dengan melakukan pelatihan atau *coaching clinic* dengan BPS selaku Pembina data sebagai narasumber.
3. Urusan Persandian
- Pengamanan informasi dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik dan untuk penanganan insiden siber dilakukan dengan operasional CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) dan penerapan SMKI;
 - Sosialisasi Keamanan Informasi terhadap OPD dan Perangkat Desa.

Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan di masa mendatang oleh para *stakeholder* DISKOMINFO Kabupaten Kebumen. Diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

A. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja DISKOMINFO Kabupaten Kebumen Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:


1. Sekretariat, bidang-bidang dan karyawan DISKOMINFO secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
 - Melaksanakan renja dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, RENJA dan DPA.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan

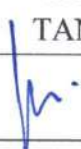

pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan RENJA 2023.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya RENJA 2024 Kabupaten Kebumen, selanjutnya rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi DISKOMINFO dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan renja tidak lepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan DISKOMINFO dan peran aktif para pemangku kepentingan.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati.

Kebumen, 8 Agustus 2023
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO, S.Sos, M.T
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691224 199001 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPEDA		
NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
KRIMA KARMILA, S.Sos, M.Eng	KABID PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR	
BUDI JATMIKO, S.Pd, M.Pd.	PERENCANA AHLI MADYA SEBAGAI SUBKOR INFRASTRUKTUR	

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2023 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi (Asisten 3 Sekda, Bappeda, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen).
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, pada:


Hari/Tanggal : Selasa/14 Februari 2023
Jam : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Panggung Terbuka Sasana Pambiwara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kebumen
Jl. Hasyim Asy'ari No.6 Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023.


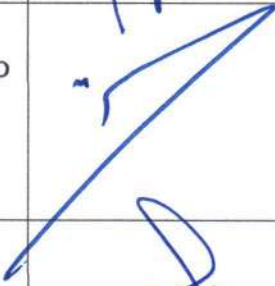
MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 14 Februari 2023
Pimpinan Sidang
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

SUKAMTO, S.Sos, M.T.

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	WINARTI, S.T	BAPPEDA	Jl. Merdeka No. 2 Kebumen	
2.	HARIS SETIAWAN, S.Kom, M.S.E	BPKPD	Jl. Pahlawan No. 2 Kebumen	
3.	Drs. BUDIONO, M.Si	Kecamatan Adimulyo	Kemujaan, Kec. Adumilyo, Kebumen	
4.	M. HUDA	Universitas Putra Bangsa Kebumen	Jl. Ronggowarsito No. 18 Pejagoan, Kebumen	
5.	SARJONO	Dewan Kesenian Daerah	Kebumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. KH. Hasyim Asy'ari No.6 Telp/Fax (0287) 381794, 383349
Email : kominfo@kebumenkab.go.id
Website : kominfo.kebumenkab.go.id Kode Pos : 54312

Nomor : 005/125
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023

Kebumen, 8 Februari 2023

Kepada

- Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Terlampir
di -
KEBUMEN

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 14 Februari 2023

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Panggung Terbuka "Sasana Pambiwara" Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen

Acara : Forum Perangkat Daerah Tahun 2023

Keterangan : -

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN



SUKAMTO, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda
NIP.196912241990011001

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kebumen
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kebumen
12.	Camat Adimulyo
13.	Camat Mirit
14.	Camat Padureso
15.	Camat Sadang
16.	Camat Sempor
17.	Para Pejabat Struktural/ Para Subkoo di Diskominfo Kab. Kebumen
18.	Komisi A DPRD Kab. Kebumen
19.	Ketua FK METRA
20.	Ketua LKM Kecamatan Klirong
21.	Ketua DKD Kabupaten Kebumen
22.	Ketua PEPADI Kabupaten Kebumen
23.	Ketua GNKK Kabupaten Kebumen
24.	Ketua PWI Kabupaten Kebumen
25.	Ketua Komunitas IT
26.	Direktur AMIK PGRI Kebumen
27.	Rektor Universitas Putra Bangsa Kebumen
28.	Pimpinan Radio MAS FM Kebumen
29.	Kepala Desa Lembupurwo
30.	Kepala Desa Seboro
31.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.




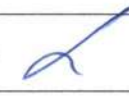
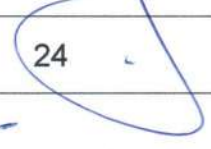





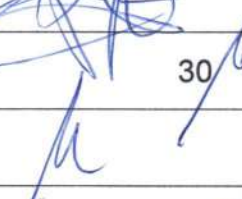







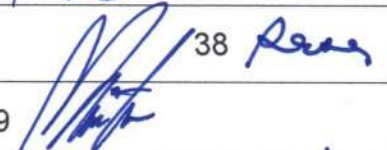



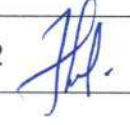








PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA










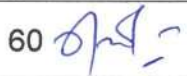

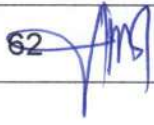






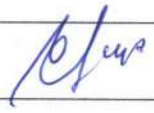


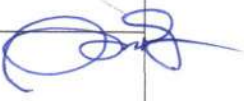







Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Kebumen ☎(0287) 383349 Fax. (0287) 381423
Kode Pos 54312















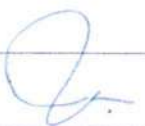


























DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023
Waktu : Pukul 13.00 WIB – selesai
Tempat : Panggung Terbuka Sasana Pambiwara Dinas Kominfo
Kabupaten Kebumen
Keperluan : Forum Perangkat Daerah Dinas Kominfo Tahun 2023

No	Nama	L/P	Instansi	Tanda Tangan
1	Muh. Anifin	L	AS 3	1
2				2
3	Djoenedi . F	L	BP GKK	3
4	Petik Sat Sitawo	L	FK Metra Kbm	4
5	Andri Priyanto	L	BPS Kab. Kbm	5
6	Dwi Irawan	L	Komitas IT Kbm	6
7	Ra R Amelia	P	AMIK PERI	7
8	Rusta M	P	ITDA	8
9	Andi	L	Kec Sadang	9
10	M. Lathif	L	Kec. Sempur	10
11	Adi Subarkah	L	Kades Seboro	11
12	Setyo Budi	L	Pepadi	12
13	Yudo Anggoro	L	Mas FM	13
14	Yahya H	L	Kominfo	14
15	Joainem	P	Bag AP	15
16	M. Huda	L	UPB	16
17	Ruzo	L	Kec Minat	17
18	Sri Panbudi	L	Diperkintub	18
19	Susoyado	L	PWI	19
20	Agung Hain	L	Kominfo	20
21	Budi Santoso	L		21

No	Nama	L/P	Instansi	Tanda Tangan
22	Surgana	L	DKD	22 
23	Andi	L	Kominfo	23 
24	Arif	L	LKM	24 
25	Darmawan	L	Kodim 0709 /KBM	25 
26	Siti Ratna W	P	Bag Organisasi	26 
27	Haris S	L	BPKPD	27 
28	Winardi	P	Bappeda	28 
29	Sregito	L	Ps. Lemburpurno	29 
30	Budiowo	L	Adimulyo	30 
31	Kuat H	L	Padurego	31 
32	Sutoto P.	L	Kominfo	32 
33	Mamu W	L	Kodim	33 
34	Ermi	P	DPMP&SA	34 
35	Ika P	P	Diskominfo	35 
36	Wahidayah M	P	Diskominfo	36 
37	Tri Ani SR	P	Diskominfo	37 
38	Aila Rezannia	P	Diskominfo	38 
39	Mittha Sari Dewi	P		39 
40	Eri M.	P		40 
41	Isti	P		41 
42	Yusef K.	L		42 
43	Agus Purnomo	L	Staff	43 
44	Dewi Larestika	P		44 
45	Catur M	L		45 
46	Nor Salim	L		46 
47	Hadi W			47 
48	Tomy F P			48 
49	Petro H			49 
50	Darsanto			50 

No	Nama	L/P	Instansi	Tanda Tangan
51	Suratno	L		51 
52	Agustina	P		52 
53	Paryanto	L		53 
54	Bodi Esti W	L		54 
55	Charla S	P		55 
56	Rizka P	P		56 
57	Sugeng P	L		57 
58	Harto	L		58 
59	Dian F	P		59 
60	Hery W	P		60 
61	Ginadha P. P	P		61 
62	A. Fatoni	L		62 
63	Lisna	P		63 
64	Bawono	L		64 
65	Saeiful Azmi	L		65 
66	Muryanto	L		66 
67	Rizki P.	L		67 
68	Avicena R. AM	L		68 
69	Eka R.			69 
70	Novita tsani F	P		70 
71	Feni M	P		71 
72	Bogi A	L		72 
73	Imanagi b	L		73 
74	Safyan S. A.P	L		74 
75	Ines R.	P		75 
76	Kurniawan S	L		76 
77	R. Imam R.	L		77 
78	Wahyu Heri,	L		78 
79	Djukanan M	L		79 

No	Nama	L/P	Instansi	Tanda Tangan
80	Diduk	L	Staff	80 
81	Dheus W	L		81 
82	Fhathur	L		82 
83	Apri	L		83 
84	A. Jarwawan	L		84 
85	Angga	L		85 
86	Adam B.	L		86 
87	Awaludin Johan	L		87 
88	m. Irfan	L		88 
89	Adi M.	L		89 
90	Wohyu Hafidudin	L		90 
91	Defri R.	L		91 
92	Bagus S.	L		92 
93	Imam Wahyuudi	L		93 
94	Agil A. A.	L		94 
95	Setigo W.	L		95 
96	Tommy F.	L		96 
97	Tunggal	P		97 
98	Parmono	L		98 
99	Pardiyanto	L		99 
100	Puji P.	L		100 

Kepala Dinas
 Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Kasamen

 SUKAMTO, S.Sos., M.T.
 NIP. 19650241999001 1001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. K.H. Hasyim Ash'ari No. 6 Kebumen. Telp. (0287) 383349.
Faximile (0287) 381423. e-mail kominfo@kebumenkab.go.id.
Website <https://kominfo.kebumenkab.go.id>
Kode pos (54312)

NOTULEN RAPAT

RAPAT : Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

Hari/ Tanggal : Selasa, 14 Februari 2023

Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d 16.00 WIB

Tempat : Panggung Sasana Pambiwara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Acara : 1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen
3. Laporan Penyelenggara;
4. Pembacaan Doa;
5. Paparan dari Asisten Administrasi Umum;
6. Paparan dari BAPPEDA
7. Paparan BPKPD
8. Sambutan Kepala Dinas Kominfo;
9. Paparan dari Inspektorat Daerah
10. Tanya Jawab
11. Penandatanganan Berita Acara;
12. Penutup

PIMPINAN RAPAT

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

Pencatat : Aila Rezannia, S.E.I

MC : Devi Vinitalia Larantika, S. Pd

Moderator : Dwi Purwantoro, S. ST

Peserta : 100 orang peserta

KEGIATAN RAPAT

1. Pembukaan : Dengan bacaan Basmallah bersama
2. Laporan Ketua Penyelenggara : Laporan Ketua Penyelenggara disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Dewi Indriastuti, SP.MM.

Dalam Lapornya disebutkan :

I. DASAR

Dasar penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 Surat Edaran Bupati tanggal 25 Januari 2023 Nomor 800/0255 tentang Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Pagu Indiatif Perangkat Daerah Tahu 2024 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

II. PELAKSANAAN

A. Waktu dan tempat

Forum Perangkat Daerah, diselenggarakan pada :

Hari / tanggal : Selasa, 14 Februari 2023

Waktu : Pukul 13.00 WIB

Tempat : Panggung Terbuka Sasana Pambiwara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen

B. Peserta :

Peserta dalam Forum Perangkat Daerah ini meliputi :

1. Unsur DPRD/ Komisi A
2. Polres Kebumen
3. KODIM 0709
4. Badan/ Instansi/ Bagian terkait
5. Camat
6. Desa/ Kelurahan
7. Ormas/ LSM
8. Lembaga Penyiaran Swasta
9. Perguruan Tinggi
10. Komunitas IT

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah guna merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b. Tujuan diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah

- 1) Memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat daerah.
- 2) Menyelaraskan program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah sebagaimana rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan usulan program kegiatan dan subkegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen, Kecamatan, dan juga pokok-pokok pikiran dari DPRD
- 3) Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan antar perangkat daerah sesuai dengan tupoksi perangkat daerah.
- 4) Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Menetapkan Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- 6) Menyesuaikan Pendanaan Program, Kegiatan DAN Sub Kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah dan prioritas pembangunan daerah pada Rancangan Perangkat Daerah serta berbagai regulasi yang terkait.

III. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

3. Sambutan Asisten Administrasi Umum : Sambutan Asisten Administrasi Umum oleh Bapak M. Arifin, S.T, M.T menyampaikan:
- a. Kegiatan Forum OPD mengacu pada Perda No 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Pada dokumen perencanaan tahunan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari masa tugas Bupati Kebumen. Masih ada tenggat waktu sampai akhir masa RPJMD (tahun 2024) untuk membawa visi mewujudkan Kabupaten Kebumen yang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak, bersama rakyat.

- c. Perkembangan / capaian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022:
- Daya saing Kabupaten Kebumen berada pada peringkat ke-30 se Jawa Tengah
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari 64,47% menjadi 70,79%
 - Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (ITPT) berkurang dari 0,11% (dari 6,03% menjadi 5,92%)
 - Dari sisi kependudukan (demografi), angka ketergantungan Kabupaten Kebumen 46,23%
 - Angka Kemiskinan di Kabupaten Kebumen sudah mengalami penurunan. Target kemiskinan pada RPJMD Tahun 2022 16-17% sudah tercapai .Realisasi 16,41%. Namun Kebumen angka kemiskinannya masih tertinggi di Jawa Tengah.
 - Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Isu Aktual Tahun 2023/2024 adanya DAU EARMARKED
 - Sesuai tupoksi Dinas Kominfo merupakan salah satu corong kepada masyarakat baik keluar maupun menampung. Keluhan dari masyarakat dianalisa kemudian disampaikan kepada OPD yang berkompeten untuk menjawab sehingga masalah bisa diselesaikan. Kominfo juga bertugas menyampaikan hasil-hasil pembangunan yang ada di Kabupaten Kebumen sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa memahami kebijakan kebijakan Pemkab.

4. Sambutan dari Bappeda Kebumen

Sambutan dari Bappeda Kebumen diwakili oleh Ibu Winarti, S.T menyampaikan:

- a. Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen mempunyai 3 (tiga) urusan yaitu :
- 1) Urusan Komunikasi dan Informatika,
 - Indikator: SPBE
 - Target dalam renstra 2021-2026 3,42% - 3,60%
 - Target di tahun 2024 3,50%
 - Berdasarkan data di Semarak Satu Data capaian tahun 2022 3,34% (masih tanda bintang)
 - 2) Urusan Statistik,
 - Indikator: presentase OPD yang mengisi website Satu Data sesuai dengan SOP
 - Capaian sudah 100%
 - 3) Urusan Persandian
 - Indikator: Presentase desa yang menerapkan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dalam layanan administrasi desa.
 - Target 16,74%-100%
 - Target Tahun 2024: 83,46%
 - Capaian Tahun 2022 39,57%
 - Mohon konfirmasi karena masih jauh dari range
- b. BAPPEDA di bidang litbang telah melakukan survey kepuasan masyarakat selama 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
- c. Rangkuman hasil survey kepuasan masyarakat:
- 1) Kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang ekonomi
 - Tingkat Desa:
 - 436 desa menyatakan sangat puas
 - 71 desa menyatakan puas
 - 30 desa menyatakan tidak puas
 - 13 desa menyatakan sangat tidak puas
 - Tingkat Kecamatan
 - 24 Kecamatan menyatakan sangat puas

- 2 Kecamatan menyatakan puas
- 2) Kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang infrastruktur
- Tingkat Desa
 - 248 desa menyatakan sangat puas
 - 84 desa menyatakan puas
 - 59 desa menyatakan tidak puas
 - 69 desa menyatakan sangat tidak puas
 - Tingkat Kecamatan
 - 13 Kecamatan menyatakan sangat puas
 - 8 kecamatan menyatakan puas
 - 5 kecamatan menyatakan tidak puas
 - Survey masih akan berlanjut sampai tanggal 23 Februari 2023
- d. Berdasarkan evaluasi terhadap OPD yang melaksanakan program unggulan banyak yang sudah tidak diprioritaskan. Program unggulan sampai akhir masa jabatan Bupati masih tetap akan dijadikan tolak ukur masing-masing OPD.
- e. BAPPEDA menyimpan dana alternatif kebijakan yang nantinya akan bisa disampaikan ke masing-masing OPD jika setelah musrenbang RKPD menjadi kesepakatan bersama.
- f. Terkait Geopark, anggaran perubahan Bupati merencanakan menambahkan 1 Milyard untuk anggaran pendukung GEOPARK.
5. Paparan Kepala Dinas Kominfo
- I. Data target 3 urusan Kominfo:
- a. Urusan Persandian
- Presentase desa yang menggunakan tanda tangan elektronik 39,5%
 - Target tahun 2024: 83%
 - Saat ini sekitar 170 desa sudah menggunakan tanda tangan e-letter
 - Upaya agar tanda tangan elektronik bergerak cepat:
 - Bupati sudah memulai menandatangani surat perintah tugas untuk semua pejabat yang menjadi kewenangannya.
 - Saat ini sedang dirancang nota dinas yang masuk sampai ke Bupati dalam model e-letter.
 - Di tingkat desa akan dilombakan siapa yang paling produktif tanda tangan e-letternya akan diberikan apresiasi
- b. Urusan Statistik
- IKU urusan statistik target semua perangkat daerah mengisi Sistem Satu Data sesuai SOP
 - Realisasi saat ini semua perangkat daerah sudah semua mengisi
 - Penilaian dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah untuk kematangan implementasi Sistem Satu Data Indonesia Kabupaten Kebumen sudah mencapai angka 80,8% (peringkat 3 Jawa Tengah)
- c. Urusan Komunikasi dan Informasi
- Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Kebumen mencapai 3,44% (kategori baik) menempatkan Kebumen pada peringkat 2 se-Jawa Tengah peringkat 9 Tingkat Nasional
- II. Rencana Kerja Dinas Kominfo ada 3 urusan dengan 5 program, 12 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Total usulan 10 Milyard.

5. Sambutan dari BPKPD : Sambutan dari Bappeda Kebumen diwakili oleh Bapak Haris Setiawan, S.Kom M. SE menyampaikan:
- a. Tahun 2024 merupakan tahun Pemilu, dampak kepada Dinas Kominfo akan terdapat banyak belanja media massa, baliho, pertunjukkan, publikasi, namun harapannya target retribusi tetap terpenuhi dan kalau bisa naik.
 - b. Berkaitan dengan tata pengelolaan asset di Dinas Kominfo, agar rapi disarankan untuk dihibahkan kepada dinas masing-masing.
 - c. Apresiasi terhadap Dinas Kominfo atas capaian target-target sekalipun anggaran minim.
6. Sambutan dari Inspektorat Daerah : Sambutan dari Bappeda Kebumen diwakili oleh Dra. Rusta Nurhayati menyampaikan bahwa:
- a. Terkait Reformasi Birokrasi yang di dalamnya mencakup ketatalaksanaan, organisasi, dan SDM serta 8 area dimana untuk SPBE di lingkup Dinas Kominfo sudah mendapatkan peringkat yang sangat baik di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
 - b. Beberapa hasil pemeriksaan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di Tahun 2022 yang perlu dicermati:
 1. Area perilaku kode etik, penghargaan serta sanksi kepada aparatur
 2. Penyusunan standar pelayanan publik yang didalamnya harus melibatkan unsur dari masyarakat serta meningkatkan inovasi dan e-service untuk pelayanan public dan sarana prasarana konsultasi untuk dapat disediakan.
 - c. Tahun 2024 akan dilaksanakan layanan administrasi desa berbasis teknologi informasi sehingga ke depannya berkolaborasi dengan pembinaan dan pengawasan yang ada di Inspektorat Daerah
7. Tanya Jawab :
- Pertanyaan : Bapak Setiabudi dari Pepadi
 1. Menanggapi Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten termiskin, kuncinya ada pada kriteria. Bagaimana jika mengundang professor/ doctor untuk dimintai pendapat mengenai kriteria apa yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan.
 2. Menanggapi akan ditambahkannya anggaran sebesar 1 Milyard bagaimana jika dana tersebut diberikan ke Tim Geopark Kebumen untuk study banding ke Bali untuk belajar bagaimana cara mendatangkan wisatawan asing.
 3. Terkait anggaran Dinas Kominfo yang masih tetap, mestinya ada kenaikan anggaran untuk Dinas Kominfo. Mengingat Dinas Kominfo merupakan corong untuk kegiatan komunikasi dengan kemitraan organisasi.
 4. Harapannya Kominfo dapat menghiasi wajah kota dan pintu masuk Kebumen dengan info-info yang diprakarsai oleh Pemkab (dikoordinasikan dengan Kominfo) bukan oleh pihak lain di luar Pemerintah Kabupaten.
 - Tanggapan : Asisten Administrasi Umum
 1. Setuju bahwa tingkat kemiskinan kuncinya ada pada kriteria
 2. Salah satu trik untuk menangani data pada indikator pemenuhan kebutuhan makanan dengan menggelontorkan bantuan bersifat bansos menjelang dilaksanakannya survey/ pendataan oleh BPS.
 - Tanggapan : Ibu Winarti

Harapan pemerintah dengan menambahkan anggaran 1 Milyard untuk mendukung Geopark, yang akan diraih lebih banyak seperti halnya KIE. Apalagi jika sudah menjadi UNESCO Global harapannya yang datang bukan hanya wisatawan domestic tetapi juga wisatawan asing.
 - Tanggapan : Bapak Haris Setiawan
 1. Untuk kegiatan Bidang IKP terdapat belanja kebijakan yang sifatnya naik turun.

Contoh: Dulu pernah mendapat aspirasi untuk anggaran pertunjukan yang bias diusulkan melalui jalur DPRD

2. Pada dasarnya Dinas Kominfo dapat mengelola pendapatan yang diperoleh dari LPPL untuk operasional sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi.
- Tanggapan : Bapak Sukamto
 1. Setuju atas masukan anggaran Dinas Kominfo untuk dinaikkan apalagi untuk meningkatkan komunikasi, publikasi, membangun citra baik melalui wajah perbatasan kota.
 2. Perlu perubahan website menjadi bilingual untuk menginternasionalkan potensi yang ada di Kebumen khususnya di sektor pariwisata dan Geopark
 3. Perlu meningkatkan digital marketing untuk menggaet generasi muda tanpa meninggalkan marketing tradisional.
 4. Dinas Kominfo sampai saat ini belum berhasil membentuk Dewan Direksi dan Dewan yang seharusnya lebih lincah dalam mengelola LPPL
 - Pertanyaan : Adi Subarkah Kepala Desa Seboro Kecamatan Sadang
 1. Terkait e-letter Desa Seboro sudah menggunakan e-letter
 2. Terkait Kemiskinan, program pemerintah pusat yang ada berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah pengentasan kemiskinan.
 3. Contoh : Program BLTDD Warga masyarakat miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah secara otomatis masuk ke DTKS. Masyarakat yang tidak tercover DTKS disediakan DT Jateng.
 - Tanggapan : Pak Junaedi Faturahman
 1. Harapannya ada bentuk komunikasi yang lebih dibanding tahun sebelumnya agar mudah dipahami masyarakat bahwa Kebumen berbasis Geopark.
 2. Diperlukan bentuk – bentuk komunikasi berbasis teori afirmasi, motivasi, sehingga menimbulkan motivasi dan inspirasi.
6. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen oleh wakil peserta
 - BAPPEDA oleh Winarti, S.T
 - BPKAD oleh Haris Setiawan, S.Kom, M.SE
 - Camat Adimulyo oleh Drs. Budiono
 - Universitas Putra Bangsa oleh M. Huda
 - Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Kebumen oleh Sarjono
 7. Acara terakhir di tutup dengan bacaan hamdallah bersama.

Kebumen, 14 Februari 2023

Notulen



AILA REZANNIA







